

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Padang terhadap produk hewan khususnya daging sapi potong dapat dikatakan masih lemah. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pengawasan yang masih memiliki beberapa kendala. Sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan. Terkait pengawasan awal, kalau dilihat dari segi modal yang berupa anggaran dan sarana pasarana, pihak Dinas Pertanian juga belum maksimal dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Terlihat dari Rumah Potong Hewan yang belum bisa memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada dikarenakan pengguna jasa rumah potong hewan yang masih sedikit. Kemudian juga masih ada sarana yang belum bisa terpenuhi dengan baik yaitu berupa pemenuhan kebutuhan akan persediaan air bersih. Selain itu terkait sumber daya manusia juga mengalami keterbatasan sehingga tidak bisa menjangkau target pengawasan secara menyeluruh. Sehingga dapat dikatakan variabel pengawasan awal secara umum belum terpenuhi karena indikator pengawasan awal seperti sarana prasarana dan sumber daya manusia belum dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang ada.

Pada pengawasan proses semua indikator juga belum dapat terpenuhi dengan baik. Walaupun ada juga yang sudah terpenuhi seperti standar yang ditetapkan sebagai panduan dalam melakukan pengawasan itu sudah jelas. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap daging sapi potong ternyata pihak Dinas Pertanian belum menerapkannya sesuai standar yang telah ditetapkan.

Hal ini dilihat dari sikap malas staf rumah potong hewan yang tidak melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai standar. Selain itu juga masih terdapat rumah potong hewan liar yang menjadikan berkurangnya pengguna jasa rumah potong hewan legal. Namun tidak bisa teratasi dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang sedikit. Kemudian dari pihak pengawas veteriner sendiri ketika melakukan pengawasan ke pasar juga belum bisa maksimal karena jumlah sumber daya manusia tidak sebanding dengan jumlah objek yang akan diawasi sehingga tidak dapat menjangkau keseluruhan target pengawasan. Akibatnya masih banyak ditemukan daging sapi potong yang positif mengandung zat berbahaya ketika selesai diuji di labor. Kemudian dari segi perbaikan penyimpangan walaupun pelaksanaan pengawasan belum efektif namun Kota Padang masih dikategorikan aman dalam produk asal hewan terutama daging sapi potong. Karena walaupun terbukti positif mengandung zat berbahaya pedagang daging tidak pernah ada yang membangkang lebih jauh. Karena ketika teguran dilakukan satu atau dua kali pedagang tersebut langsung mengubah dagangannya. Jadi tidak pernah ada yang sampai parah hingga masuk ke pengadilan. Sosialisasi yang dilakukan juga tidak bisa menjangkau setiap lapisan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai daging sapi yang ASUH.

Selanjutnya pengawasan akhir dimana Dinas Pertanian diwajibkan membuat laporan hasil pengawasan sebanyak satu sekali dalam 3 bulan. Namun pada kenyataannya laporan hanya dibuat satu kali setahun oleh Pihak Dinas Pertanian. Kemudian laporan yang dibuat juga tidak valid karena tidak mewakili seluruh pedagang atau masyarakat Kota Padang sebagai target pengawasan. Selanjutnya laporan juga tidak menjadi umpan balik bagi Dinas Pertanian karena

laporan sebelumnya tidak ada memberikan pengaruh atau dampak. Terlihat dari hasil uji labor yang tidak menunjukkan penurunan angka kecurangan yang dilakukan pedagang.

## 6.2 Saran

Agar pelaksanaan pengawasan terhadap produk hewan khususnya daging sapi potong di Kota Padang berjalan dengan baik. Dinas Pertanian diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

1. Melengkapi fasilitas di rumah potong hewan terutama untuk penerapan higiene sanitasi, dan laboratorium untuk pengujian produk hewan.
2. Menambah jumlah anggaran dan sumber daya manusia sebagai pengawas kesmavet.
3. Pihak dinas dapat membuat suatu program yang dapat menarik para pemilik tukang potong liar sehingga bersedia bergabung untuk memotong di rumah potong hewan milik pemerintah.
4. Memberikan sanksi yang lebih tegas agar ada sikap jera bagi pelaku kecurangan daging sapi potong.
5. Memperbanyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait daging sapi potong yang tidak layak konsumsi.
6. Mempelajari kembali laporan-laporan hasil kegiatan sebagai dasar untuk perbaikan kedepannya.

